

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas dalam permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman pada dasarnya Balai Taman Nasional Gunung Merapi melakukan penanggulangan terhadap kerusakan hutan konservasi mengacu pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi masih ada oknum yang melakukan perusakan hutan konservasi. Balai Taman Nasional Gunung Merapi sudah memaksimalkan pengamanan agar tidak terjadi perusakan hutan dan dibuktikan dengan menangkap para pelanggar tersebut dan mengadilinya sesuai peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, pihak Balai Taman Nasional Gunung Merapi telah melakukan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan konservasi serta kegiatan apel siaga kebakaran hutan dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan mitra kerja Balai Taman Nasional Gunung Merapi.
2. Faktor-faktor yang menghambat Balai Taman Nasional Gunung Merapi dalam penanggulangan kerusakan hutan konservasi di Kabupaten Sleman yaitu pertama, oknum yang menggunakan alat-alat atau cara untuk mencari

rumpun di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi mengenai bibit tanaman. Dalam kegiatan rehabilitasi hutan, masyarakat yang mencari rumput secara tidak sengaja maupun sengaja dapat mengenai bibit tanaman. Kedua, faktor fisik seperti fisik geologi yaitu kondisi tanah yang didominasi dengan batu pasir di lereng Merapi pasca erupsi sulit untuk ditanami tumbuhan. Ketiga, masyarakat dalam kepedulian dan pemahaman hutan masih rendah. Tingkat pemahaman masih rendah menjadi kendala dalam kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan hutan sehingga cenderung merusak kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Keempat, jumlah penjaga hutan tidak sebanding dengan luas kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Ancaman yang besar dari masyarakat yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan hutan konservasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang didapat sebagai berikut:

1. Masyarakat dalam kegiatan perumputan dan/atau berkebun sebaiknya menggunakan alat-alat yang lazim dan dilakukan secara benar. Sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang menggunakan alat-alat berat melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan. Selain dapat merusak tanaman tetapi dapat

menimbulkan lahan kritis yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat.

2. Kondisi tanah yang didominasi dengan batu pasir di lereng Merapi pasca erupsi sulit untuk ditanami tumbuhan. Dengan kondisi lahan berbatu pasir sangat cepat menyebabkan kekeringan dan menghambat penanaman kembali tanaman dalam kegiatan rehabilitasi. Perlu adanya kerjasama dengan pihak pertanian untuk mengelola lahan tersebut agar mudah ditanami tumbuhan. Pengelolaan dengan baik dan benar akan mempercepat proses pertumbuhan tanaman pohon dengan kondisi lahan yang tidak subur.
3. Diharapkan kesadaran dari masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar mereka bahwa hutan sangat penting sebagai penyangga kehidupan. Kita tidak memungkiri bahwa banyak masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Merapi yang bergantung terhadap hutan di daerah tersebut, tetapi akan lebih baik lagi jika masyarakat menjaga kelestarian lingkungan dan tetap mencari kebutuhan di area yang telah ditentukan. Balai Taman Nasional Gunung Merapi harus lebih giat dalam pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan. Adanya hutan yang lestari pasti akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi merasa nyaman.
4. Balai Taman Nasional Gunung Merapi diharapkan lebih meningkatkan terhadap pengawasan dan penjagaan kawasan hutan konservasi dengan

menambah sumber daya manusia, karena yang terjadi bahwa di resor masih minim sumber daya manusia dengan wilayah penjagaan tidak sebanding dengan jumlah petugas. Pembagian petugas polisi hutan juga tidak merata dalam setiap resor. Dalam pengawasan dan penjagaan setiap resor diharapkan sama rata dari masing-masing resor. Petugas resor juga diharapkan bisa meningkatkan pengelolaan kawasan hutan diwilayahnya masing-masing.

